



BUPATI PEMALANG

Pemalang, 15 Februari 2024

Kepada Yth.

1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
2. Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang

di
Pemalang

SURAT EDARAN

NOMOR: 188.4/000414/2024

TENTANG

PERSIAPAN PENGUKURAN KUALITAS KEBIJAKAN PUBLIK
DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 2024, Indeks Reformasi Hukum (IRH) dan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) telah ditetapkan, dilanjutkan, disinergikan, dan disederhanakan untuk mengukur Area Perubahan Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan.

Penguatan Kebijakan Publik berbasis bukti dengan *Big Data* dan *Artificial Intelligent* menjadi salah satu dari 9 kebijakan birokrasi digital yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tersebut. Sasaran kebijakan ini adalah "Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi", yaitu setiap kebijakan publik dan regulasi yang akan diterbitkan oleh instansi harus berdasarkan pada bukti dari sumber data yang relevan dan valid. Dengan demikian, kualitas kebijakan yang akan diterbitkan dan diimplementasikan menjadi lebih efektif karena dapat menjadi solusi dalam setiap isu strategis yang menjadi latar belakang terbitnya kebijakan dan regulasi.

Pengukuran IKK akan menghasilkan profil kualitas kebijakan pada seluruh instansi pemerintah baik K/L/D di Indonesia. Profil IKK seluruh instansi pemerintah tersebut selanjutnya akan dimanfaatkan untuk mengembangkan strategi peningkatan kualitas kebijakan bagi pemerintah maupun pemerintah daerah.

Mengacu pada Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 22/K.1.HKM.02.2/2021 tentang Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan, bahwa pengukuran kualitas kebijakan dilakukan setiap 2 (dua) tahun dan telah dimulai pada tahun 2021. Dengan demikian, pengukuran selanjutnya akan dilakukan pada tahun 2025.

Untuk mempersiapkan pengukuran kualitas kebijakan (peraturan daerah dan peraturan bupati) pada tahun 2025 dan tahun-tahun berikutnya, Saudara agar diminta untuk:

1. memastikan bahwa proses perencanaan kebijakan telah melalui tahapan agenda setting (identifikasi masalah, analisis masalah, dan partisipasi publik);
2. melakukan formulasi kebijakan berdasarkan kriteria yang terukur;
3. mengimplementasikan kebijakan yang telah disusun dengan fokus pada dimensi pengorganisasian, komunikasi, dan monitoring kebijakan;
4. melakukan evaluasi kebijakan yang telah dilaksanakan dengan fokus pada efektivitas, efisiensi, dampak, kemanfaatan serta penerimaan dan responsivitas kebijakan;
5. memedomani instrumen dan indikator Indeks Kualitas Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara dalam proses penetapan *agenda setting*, formulasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan sebagaimana terlampir;
6. Instrumen dan indikator Indeks Kualitas Kebijakan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dapat diunduh pada tautan <https://bit.ly/PanduanPengukuranIKK>; dan
7. mendokumentasikan bukti dukung semua kegiatan mulai dari proses penetapan agenda setting, formulasi kebijakan, evaluasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dipedomani.

BUKTI PEMALANG,

MANSUR HIDAYAT, S.T.

LAMPIRAN
SURAT EDARAN BUPATI PEMALANG
NOMOR: 188.4/ /TAHUN 2024
TENTANG PERSIAPAN PENGUKURAN KUALITAS
KEBIJAKAN PUBLIK DI KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2025

TABEL INSTRUMEN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN

I PENILAIAN PERENCANAAN KEBIJAKAN (45%)				
A.	PENILAIAN AGENDA SETTING KEBIJAKAN (45%)			
Tahapan/Pernyataan Kunci		Jawaban	Bukti	Keterangan
A.1	Identifikasi dan Validasi Masalah (55%)			
	a	Sumber masalah kebijakan yang mendorong inisiatif tindak lanjut perumusan kebijakan.	Penentuan masalah berasal dari atas (<i>top down</i>) maupun dari bawah (<i>bottom up</i>), dengan melibatkan stakeholder eksternal dan partisipasi kelompok sasaran	Dokumen yang menunjukkan proses interaksi instansi dengan stakeholder dan/atau kelompok sasaran sebelum diterbitkannya kebijakan yang membahas sumber masalah kebijakan misalnya surat undangan rapat/pertemuan/FGD atau naskah analisis kebijakan atau naskah rekomendasi kebijakan terkait masalah kebijakan (yang sedang dinilai).
			Penentuan masalah dari atas (<i>top down</i>) maupun dari bawah (<i>bottom up</i>) dengan mempertimbangkan masukan stakeholder eksternal	
	b	Masalah kebijakan yang diidentifikasi merupakan isu kebijakan yang menjadi bagian dari program prioritas nasional.	Penentuan masalah dari atas (<i>top down</i>), melibatkan stakeholder eksternal pemerintah, tanpa partisipasi kelompok sasaran	Dokumen yang menunjukkan keterkaitan kebijakan dengan program prioritas nasional di periode tahun terbitnya kebijakan, misalnya tercantum dalam Perpres tentang Program Prioritas Nasional atau prolegnas atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari ditetapkan kebijakan (yang sedang dinilai) atau tercantum dalam RPJMN/RPJMD dan disertai penjelasan.
			Penentuan masalah dari atas (<i>top down</i>), hanya ditentukan dari internal instansi pemerintah, tanpa partisipasi stakeholder eksternal dan kelompok sasaran	
			Berkaitan secara langsung dengan prioritas nasional jangka pendek dan jangka menengah	Pilih salah satu jawaban
			Berkaitan secara langsung dengan prioritas nasional jangka pendek atau jangka menengah	
			Berkaitan secara tidak langsung dengan prioritas nasional jangka pendek atau jangka menengah	
			Tidak berkaitan dengan prioritas nasional dalam jangka pendek atau jangka menengah	

TABEL INSTRUMEN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN

Tahapan/Pernyataan Kunci		Jawaban	Bukti	Keterangan
c	Masalah kebijakan yang diidentifikasi memiliki keterkaitan dengan masyarakat umum dan kelompok tertentu yang memiliki kerentanan di masyarakat atau di ranah publik sesuai sektor kebijakannya.	Masalah kebijakan berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat umum dan kepentingan kelompok tertentu yang memiliki kerentanan	Naskah analisis kebijakan atau rekomendasi kebijakan atau berita media massa atau berupa hasil tertulis dari pertemuan/diskusi/rapat/FGD yang melibatkan kelompok yang memiliki kebutuhan spesifik/khusus sebelum terbitnya kebijakan (yang sedang dinilai) atau pernyataan dari Instansi atau lembaga terkait, seperti Komnas Anak/Perempuan, Organisasi disabilitas, serikat buruh, kelompok atau stakeholder lain yang menunjukkan perlunya diterbitkan kebijakan (yang sedang dinilai) sebagai alternatif solusi dari masalah kebijakan yang dihadapi oleh kelompok rentan di masyarakat, dan penielasannya.	kelompok rentan adalah kelompok tertentu dalam skala minoritas yang mungkin kurang mendapatkan manfaat yang optimal dari pelaksanaan kebijakan (misalnya kelompok perempuan, disabilitas, lansia, masyarakat adat, kelompok usaha mikro, fakir miskin, penyintas penyakit tertentu)
		Masalah kebijakan berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat umum atau kepentingan kelompok tertentu yang memiliki kerentanan		
		Masalah berkaitan secara tidak langsung dengan kepentingan masyarakat umum atau kepentingan kelompok tertentu yang memiliki kerentanan		
		Masalah tidak berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum atau kepentingan kelompok tertentu yang memiliki kerentanan		
		Perhatian stakeholder/publik sangat intensif terhadap masalah, menimbulkan konflik, dan mendesak instansi mengambil kebijakan		
d	Situasi perhatian stakeholder/publik terhadap masalah kebijakan.	Perhatian stakeholder/publik cukup intensif terhadap masalah, menimbulkan polemik tanpa konflik, dan mendorong instansi mengambil kebijakan	Naskah analisis kebijakan, hasil kajian/telaahan, rekomendasi kebijakan, berita media massa, surat pembaca, surat keluhan/protes tertulis, quick survey isu, dokumentasi tertulis hasil pertemuan/diskusi/rapat/FGD yang mendesak terbitnya kebijakan (yang sedang dinilai) untuk mengatasi masalah.	Intensitas dapat dilihat dari situasi perhatian publik/stakeholder baik di media massa, media sosial, atau media interaksi lainnya dalam lingkup kebijakannya.
		Perhatian stakeholder/publik kurang intensif terhadap masalah, polemik rendah, dan mengharapakan instansi mengambil kebijakan		
		Perhatian stakeholder/publik tidak ada terhadap masalah, tidak ada polemik, dan tidak urgen bagi instansi untuk mengambil kebijakan		

TABEL INSTRUMEN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN

Tahapan/Pernyataan Kunci		Jawaban	Bukti	Keterangan
A.2 Penyaringan dan Konsultasi publik terhadap masalah kebijakan (45%)				
	a	Isu ditentukan dengan konsensus aspirasi seluruh stakeholder dan dilakukan analisis kebijakan terkait	Dokumen yang menunjukkan dokumentasi interaksi instansi dengan stakeholder dan/atau kelompok sasaran yang berkaitan dengan proses penyaringan masalah (dapat berupa dokumen antara lain naskah rekomendasi kebijakan atau rencana aksi atau Berita Acara; Notulensi dan daftar hadir pertemuan)	Pilih salah satu jawaban
		Isu ditentukan dengan konsensus aspirasi beberapa stakeholder dan dilakukan analisis kebijakan terkait		
		Isu ditentukan dengan konsensus aspirasi beberapa stakeholder namun tanpa dilakukan analisis kebijakan terkait		
		Isu ditentukan tanpa dengan konsensus aspirasi stakeholder dan tanpa dilakukan analisis kebijakan terkait		
	b	Belum ada kebijakan yang menjadi acuan untuk mengatasi masalah	Penjelasan/deskripsi adanya kesenjangan kondisi atau gap kebijakan saat itu dan lampiran pendukung dokumen kebijakan yang masih berlaku saat itu.	Pilih salah satu jawaban
		Ada kebijakan namun masih bersifat umum dan belum mampu mengatasi masalah		
		Ada kebijakan yang masih berlaku, tetapi belum secara optimal diimplementasikan		
		Ada kebijakan yang masih berlaku, namun tidak dapat diimplementasikan		
	c	Tekanan dari kelompok legislatif atau kelompok berpengaruh di luar instansi	Dokumen yang berkaitan dengan tugas fungsi instansi, berita media massa, surat pembaca, hasil kajian/telaahan, surat keluhan/protes tertulis, quick survey isu, hasil pertemuan/diskusi/rapat/FGD yang relevan dengan jawaban yang dipilih.	Bisa memilih lebih dari satu jawaban Penilaian: lebih atau sama dengan 4, 3, 2, 1
		Adanya temuan dari suatu kajian atau publikasi ilmiah terkait masalah		
		Terjadi berulang dalam kurun waktu tertentu sebelum adanya kebijakan		
		Muncul dalam arus utama di media massa saat wacana kebijakan berkembang		
A.3	Informasi tambahan terkait agenda setting kebijakan	Silahkan untuk menambahkan informasi penting terkait agenda setting kebijakan dilihat dari aspek : 1. identifikasi dan validasi masalah, dan 2. penyaringan dan konsultasi publik terhadap masalah kebijakan		

TABEL INSTRUMEN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN

B. PENILAIAN FORMULASI KEBIJAKAN (55%)				
Tahapan/Pernyataan Kunci		Jawaban		Keterangan
B.1 Karakteristik Mendasar (10%)				
	a	Kebijakan memiliki tujuan yang jelas	Tujuan kebijakan dinyatakan secara eksplisit dan mudah dipahami Tujuan kebijakan dinyatakan secara eksplisit namun kurang dapat dipahami Tujuan kebijakan dinyatakan secara eksplisit namun tidak dapat dipahami Tidak terdapat tujuan kebijakan secara eksplisit	Naskah Kebijakan terdapat pernyataan tujuan kebijakan: (1) apa saja yang diatur, (2) didefinisikan dengan jelas, (3) siapa saja yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan, (4) tugas, fungsi, hak, kewajiban terdefinisi dengan jelas
	b	Kebijakan didasarkan pada opsi kebijakan yang masing-masing opsi telah dikaji kemanfaatannya	Semua Opsi kebijakan telah dikaji kemanfaatannya Sebagian opsi kebijakan telah dikaji kemanfaatannya hanya satu opsi kebijakan yang dikaji kemanfaatannya tidak ada opsi yang dikaji kemanfaatannya	Terdapat beberapa opsi kebijakan yang dikaji kemanfaatannya
B.2 Berorientasi Kedepan (15%)				
	a	kebijakan yang dibuat dapat menjawab permasalahan dan tantangan saat ini dan ke depan	Seluruh isi kebijakan dapat menjawab permasalahan dan tantangan saat ini dan ke depan dengan baik Sebagian besar isi kebijakan dapat menjawab permasalahan dan tantangan saat ini dan ke depan Hanya sebagian kecil isi kebijakan dapat menjawab permasalahan dan tantangan saat ini dan kedepan Kebijakan tidak dapat menjawab permasalahan saat ini maupun ke depan	(1) Naskah Kebijakan; (2) background paper/naskah akademik kebijakan Terdapat pernyataan terhadap masalah yang akan diselesaikan dan mempertimbangkan proyeksi dinamika permasalahan kedepan dan terkait dengan mitigasi resikonya
	b	muatan/substansi kebijakan telah mempertimbangkan risiko dan penanganan risiko yang mungkin timbul	Terdapat strategi penanganan terhadap semua resiko yang telah dipetakan Terdapat strategi penanganan terhadap sebagian besar resiko yang telah dipetakan Terdapat strategi penanganan terhadap beberapa resiko Tidak terdapat analisis strategi penanganan resiko	kajian/analisis kebijakan telah melakukan mitigasi risiko dari implementasi kebijakan yang meliputi pemetaan risiko, pemetaan stakeholder, serta penetapan strategi penanganan risiko yang mungkin timbul

TABEL INSTRUMEN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN

Tahapan/Pernyataan Kunci		Jawaban	Bukti	Keterangan	
B.3 Outward looking (20%)					
	a	rumusan kebijakan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan stakeholder serta mempertimbangkan lingkungan eksternal kebijakan	rumusan kebijakan memenuhi seluruh kebutuhan stakeholder dan mempertimbangkan seluruh lingkungan eksternal kebijakan	(1) Naskah Kebijakan Background paper/ kajian kebijakan yang mendasari formulasi kebijakan perlu dilakukan pemetaan stakeholder untuk dapat menilai cakupan kebutuhan stakeholder dalam ruang lingkup kebijakan yang sedang dinilai.	
			rumusan kebijakan memenuhi sebagian besar kebutuhan stakeholder dan mempertimbangkan sebagian besar lingkungan eksternal kebijakan		
			rumusan kebijakan memenuhi sebagian kecil kebutuhan stakeholder dan mempertimbangkan sebagian kecil lingkungan eksternal kebijakan		
	b	rancangan kebijakan dikonsultasikan kepada stakeholder dan pihak yang akan terdampak	rumusan kebijakan tidak memenuhi kebutuhan stakeholder dan tidak mempertimbangkan lingkungan eksternal kebijakan	Background paper/ kajian kebijakan yang mendasari formulasi kebijakan Terdapat analisis stakeholder; terdapat laporan perkonsultasian atau uji publik di fase formulasi kebijakan dan terdapat catatan masukan yang diakomodasikan	
			seluruh materi rancangan kebijakan dilakukan konsultasi kepada seluruh stakeholder dan pihak yang akan terdampak		
			beberapa bagian materi rancangan kebijakan dilakukan konsultasi kepada beberapa stakeholder dan pihak yang akan terkena dampak		
	c	rancangan kebijakan mempertimbangkan kepentingan kelompok rentan yang berpotensi terdampak, baik langsung ataupun tidak langsung	rancangan kebijakan tidak dilakukan konsultasi dengan stakeholder dan pihak yang akan terdampak	tdp hasil Identifikasi kelompok rentan, pelibatan dan masukan dari kelompok rentan kelompok rentan adalah kelompok tertentu dalam skala minoritas yang mungkin kurang mendapatkan manfaat yang optimal dari pelaksanaan kebijakan (misalnya kelompok perempuan, disabilitas, lansia, masyarakat adat, kelompok usaha mikro, fakir miskin, penyintas penyakit tertentu)	
			Semua kelompok rentan dipertimbangkan dalam rancangan kebijakan		Background paper/ kajian kebijakan yang mendasari formulasi kebijakan
			sebagian besar kelompok rentan dipertimbangkan dalam rancangan kebijakan		
			sebagian kecil kelompok rentan dipertimbangkan dalam rancangan kebijakan		
			tidak mempertimbangkan kelompok rentan dalam rancangan kebijakan		

TABEL INSTRUMEN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN

Tahapan/Pernyataan Kunci		Jawaban		Bukti	Keterangan
B.4	Berbasis Bukti (40%)				
	a	perumusan kebijakan dilakukan berdasarkan kajian dan analisis yang memadai	Perumusan kebijakan didukung adanya kajian dan analisis yang sangat memadai	Background paper/ kajian kebijakan yang mendasari formulasi kebijakan	Terdapat Kajian/ research yang khusus dilakukan untuk mendukung perumusan kebijakan ini dan disusun secara sistematis dan memenuhi aspek-aspek ilmiah yang meliputi: (1) identifikasi masalah dan penetapan tujuan kebijakan (2) pengembangan kriteria pemecahan masalah (3) pengembangan alternatif-alternatif kebijakan (4) evaluasi alternatif kebijakan berdasarkan kriteria (5) rekomendasi kebijakan dan rencana aksi
			Perumusan kebijakan didukung adanya kajian dan analisis yang cukup memadai		
			Perumusan kebijakan didukung adanya kajian dan analisis yang kurang memadai		
			Perumusan kebijakan didukung adanya kajian dan analisis yang kurang memadai		
	b	Kajian dan analisis untuk perumusan kebijakan didukung dengan bukti yang memadai	Kajian dan analisis untuk perumusan kebijakan didukung bukti yang sangat memadai	Background paper/ kajian kebijakan yang mendasari formulasi kebijakan	cakupan dari bukti meliputi data statistik dan administratif, bukti berbasis penelitian, bukti dari masyarakat dan pemangku kepentingan, serta bukti dari evaluasi.
			Kajian dan analisis untuk perumusan kebijakan didukung bukti yang cukup memadai		
			Kajian dan analisis untuk perumusan kebijakan didukung sedikit bukti		
			Kajian dan analisis untuk perumusan kebijakan tanpa ada dukungan bukti sama sekali		
	c	penyusunan kebijakan didukung oleh dokumentasi yang lengkap dan memadai untuk pembelajaran di masa mendatang?	semua terdokumentasi dengan baik	terdapat sistem/mechanisme yang mendukung dokumentasi kebijakan (meliputi dimensi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan)	sistem/mechanisme dalam hal ini dapat meliputi sistem informasi, proses bisnis, atau tata laksana dalam pendokumentasian proses kebijakan.
			sebagian besar terdokumentasi dengan baik		
			sebagian kecil terdokumentasi dengan baik		
			tidak ada dokumentasi		

TABEL INSTRUMEN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN

Tahapan/Pernyataan Kunci		Jawaban	Bukti	Keterangan
B.5 Inovatif (15%)				
a	kebijakan menawarkan/memberikan alternatif solusi baru terhadap permasalahan	>80% alternatif merupakan solusi baru terhadap permasalahan kebijakan	Dokumen analisis alternatif kebijakan, dokumentasi proses dialog/diskusi dengan ahli/stakeholder yang relevan	rancangan kebijakan memiliki kemungkinan untuk diterima apabila menawarkan pendekatan/solusi baru terhadap permasalahan publik yang dihadapi. Dalam hal ini, perumus kebijakan dituntut untuk dapat sejauh mungkin melakukan elaborasi opsi-opsi baru yang diperoleh baik melalui kajian/analisis, atau mendapatkan informasi dari berbagai pihak yang relevan
		>40% - 80% alternatif merupakan solusi baru terhadap permasalahan kebijakan		
b	kebijakan memberikan nilai tambah/manfaat baru bagi stakeholder	< 40% alternatif merupakan solusi baru terhadap permasalahan kebijakan	Dokumen analisis alternatif kebijakan, dokumentasi proses dialog/diskusi dengan ahli/stakeholder yang relevan	aspek yang dimaksud dapat meliputi aspek ekonomi, sosial, lingkungan, kesehatan, budaya, keamanan, politik, dsb.
		Tidak ada alternatif solusi baru terhadap permasalahan kebijakan		
c	kebijakan memberikan cara/metode baru untuk implementasinya	>5 aspek yang memberikan nilai tambah/manfaat baru bagi stakeholder dari kebijakan yang ada	(1) Naskah Kebijakan (2) Background paper/ kajian kebijakan yang mendasari formulasi kebijakan	Terdapat kebaruan / inovasi metode pelaksanaan kebijakan pada dokumen desain/rancangan implementasi kebijakan
		2-5 aspek yang memberikan nilai tambah/manfaat baru bagi stakeholder dari kebijakan yang ada		
B.6	Informasi tambahan terkait formulasi kebijakan	hanya 1 aspek yang memberikan nilai tambah/manfaat baru bagi stakeholder dari kebijakan yang ada		
		Tidak ada nilai tambah/manfaat baru bagi stakeholder dari kebijakan yang ada		
		>80% Cara/metode implementasi kebijakan berbeda sama sekali dengan yang lainnya		
		Terdapat cukup banyak unsur kebaruan dalam cara/metode implementasi		
		Terdapat beberapa unsur kebaruan dalam cara/metode implementasi		
		Tidak ada unsur kebaruan dalam cara/metode implementasi		
Silahkan untuk menambahkan informasi penting terkait formulasi kebijakan dilihat dari aspek : 1. karakteristik dasar, 2. berorientasi kedepan, 3. outward looking, 4. berbasis bukti, dan 5. inovatif				

TABEL INSTRUMEN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN

II PENILAIAN EVALUASI KEMANFAATAN KEBIJAKAN (55%)					
C. PENILAIAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN (50%)					
C.		Jawaban		Bukti	
Tahapan/Pernyataan Kunci					
C.1 Pengorganisasian (30%)					
	a	Dilakukan uji coba/piloting terhadap kebijakan	Dilakukan uji coba/piloting dengan lingkup relatif lebih luas dan waktu yang lama	1. turunan kebijakan yang ditetapkan, seperti SE, peraturan teknis (bupati/walikota), SK, dll 2. TOR/KAK/RAB, dsb	Uji coba/piloting kebijakan merupakan kegiatan pra implementasi untuk mengetahui sejauh mana tingkat efektivitas keberhasilan program/kebijakan.
			Dilakukan uji coba/piloting dengan lingkup dan waktu yang cukup		
			Dilakukan uji coba/piloting dengan lingkup dan waktu yang sempit/terbatas		
			Tidak dilakukan uji coba/piloting		
	b	Kejelasan unit kerja/kelompok kerja/tim yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap implementasi kebijakan	terdapat kejelasan unit kerja/kelompok kerja/tim yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap implementasi kebijakan dan sesuai dengan kebutuhan	surat keputusan, peraturan, pedoman, atau bentuk dokumen resmi lainnya	Berisi deskripsi kelembagaan yang dibentuk dan lampiran dokumen legal terkait kelembagaan. Tahap ini merupakan upaya untuk melihat apakah implementasi kebijakan didukung oleh aspek kelembagaan yang baik
			terdapat unit kerja/kelompok kerja/tim yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap implementasi kebijakan namun tidak sesuai dengan kebutuhan		
			terdapat unit kerja/kelompok kerja/tim yang mengimplementasikan kebijakan namun tidak jelas kewenangan dan tanggungjawabnya		
			tidak terdapat unit kerja/kelompok kerja/tim yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap implementasi kebijakan		

TABEL INSTRUMEN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN

Tahapan/Pernyataan Kunci		Jawaban	Bukti	Keterangan
c	Terdapat kejelasan strategi implementasi kebijakan yang dilengkapi dengan ukuran/indikator keberhasilan tujuan kebijakan	Terdapat strategi implementasi kebijakan yang jelas dengan memuat indikator target keberhasilan implementasi	Bentuk dokumen dapat berupa rencana kerja, pedoman/juknis dan atau timeline kegiatan (TOR, KAK, dsb)	Rencana kerja merupakan serangkaian tujuan dan proses yang bisa membantu tim dan/atau seseorang mencapai tujuan tersebut dan memuat rencana kerja, jadwal/road map/rencana aksi dan rencana alokasi sumber daya.
		Terdapat strategi implementasi kebijakan yang jelas, namun belum memuat indikator target keberhasilan implementasi		
		Terdapat strategi implementasi kebijakan namun tidak jelas dan belum memuat indikator target keberhasilan implementasi		
		Tidak terdapat strategi implementasi kebijakan		
d	Terdapat alokasi sumber daya manusia (SDM) dan anggaran sudah sesuai dengan kebutuhan	Rencana alokasi sumber daya manusia dan anggaran yang sangat sesuai dengan kebutuhan	lampiran notulen rapat dalam penentuan alokasi SDM atau telaahan staf , SK tim, peraturan, dokumen resmi RAB	Jumlah alokasi SDM dan anggaran harus sesuai dengan yang dibutuhkan agar efektif dan efisien.
		tersedia rencana alokasi SDM dan anggaran yang cukup sesuai dengan kebutuhan		
		tersedia rencana alokasi sumber daya manusia dan anggaran namun hanya beberapa yang sesuai dengan kebutuhan		
		tidak tersedia rencana alokasi sumber daya manusia dan anggaran		

TABEL INSTRUMEN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN

Tahapan/Pernyataan Kunci		Jawaban	Bukti	Keterangan
C.2	Komunikasi Kebijakan (35%)			
	a	Terdapat strategi komunikasi kebijakan yang baik	Terdapat strategi komunikasi kebijakan dengan mempertimbangkan seluruh target audience/Pemangku kepentingan yang terkait	Ada rencana komunikasi yang memuat target komunikasi dan metode komunikasi. Dalam penentuan target itu dipastikan memasukkan kelompok yang mungkin terdampak oleh kebijakan, terutama kelompok rentan. Harus dicantumkan stakeholder apa saja yang ada dalam proses komunikasi kebijakan. a. Internal; b. Internal dan Eksternal (K/L/Pemda/SKPD lain terkait); c. Internal dan Eksternal (K/L/Pemda/SKPD lain, dan masyarakat/stakeholder
			Terdapat strategi komunikasi kebijakan dengan mempertimbangkan beberapa target audience/Pemangku kepentingan yang terkait	
			Terdapat strategi komunikasi kebijakan namun tidak mempertimbangkan target audience/Pemangku	
			Tidak terdapat strategi komunikasi kebijakan	
	b	Frekuensi sosialisasi kepada target audience/pemangku kepentingan dalam 1 (satu) tahun pertama	>9 kali	Melalui berbagai pertemuan, konsultasi, dan interaksi media sosial
			7-9 kali	
			4-6 Kali	
			1-3 Kali	
	c	Variasi jenis media komunikasi kebijakan yang digunakan	Terdapat 6 atau lebih jenis media komunikasi	pilihan media komunikasi yang beragam diharapkan dapat memenuhi kebutuhan interaksi dengan para pemangku kepentingan
			Terdapat 4-5 jenis media komunikasi	
			Terdapat 2-3 jenis media komunikasi kebijakan	
			Terdapat 1 (satu) jenis media komunikasi kebijakan	

TABEL INSTRUMEN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN

Tahapan/Pernyataan Kunci		Jawaban		Bukti	Keterangan
C.3 Monitoring Implementasi Kebijakan (35%)					
	a Intensitas pelaksanaan kegiatan monitoring	Setiap bulan	laporan hasil pemantauan/monitoring kebijakan	Dilihat frekuensi pelaksanaan monitoring pada suatu kebijakan yang telah diimplementasikan	
		Setiap triwulan			
		Setiap semester			
		Setiap tahun			
	b Ruang lingkup kegiatan monitoring	kegiatan monitoring mencakup seluruh ruang lingkup dalam strategi implementasi yang disusun , termasuk alokasi SDM dan anggaran	laporan hasil pemantauan/monitoring kebijakan	melihat cakupan aspek dari monitoring yang dilaksanakan, yang terdiri dari anggaran, SDM, metode/cara, kelompok sasaran, dan sarana prasarana.	
		kegiatan monitoring mencakup sebagian besar ruang lingkup dalam strategi implementasi yang disusun			
		Kegiatan monitoring mencakup sebagaian kecil ruang lingkup strategi implementasi yang disusun			
		tidak dilakukan kegiatan monitoring implementasi kebijakan			
	c Tindaklanjuti hasil monitoring implementasi kebijakan	>80% hasil monitoring implementasi kebijakan ditindaklanjuti	penjelasan tentang tindak lanjut dari monitoring dan lampirkan surat/dokumen resmi yang lain sebagai tindak lanjut hasil monitoring	melihat apakah ada tindak lanjut dari kegiatan monitoring terhadap perbaikan implementasi kebijakan	
		>40% - 80% hasil monitoring implementasi kebijakan ditindaklanjuti			
		< 40% hasil monitoring implementasi kebijakan ditindaklanjuti			
		tidak ada tindak lanjut			
C.4	Informasi tambahan terkait implementasi kebijakan	Silahkan untuk menambahkan informasi penting terkait implementasi kebijakan dilihat dari aspek : 1. pengorganisasian, 2. komunikasi kebijakan, 3. monitoring implementasi kebijakan			

TABEL INSTRUMEN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN

D. PENILAIAN EVALUASI KEBIJAKAN (50%)				
Tahapan/Pernyataan Kunci		Jawaban		
D.1 Efektivitas (40%)		Bukti		
a	Dilakukan evaluasi terhadap pencapaian tujuan kebijakan	Evaluasi terhadap pencapaian seluruh tujuan kebijakan secara terukur	Laporan evaluasi ketercapaian tujuan kebijakan beserta success and failure factors	Kebijakan yang dibuat dapat mewujudkan tujuan yang ingin dicapai dari dibuatnya kebijakan tersebut misalnya menyelesaikan
		Evaluasi terhadap pencapaian sebagian besar tujuan kebijakan secara terukur		
		Evaluasi terhadap pencapaian sebagian kecil tujuan kebijakan secara terukur		
		Belum dilakukan evaluasi terhadap pencapaian tujuan keb		
b	Dilakukan evaluasi atas metode/strategi implementasi kebijakan dengan tujuan kebijakan	Telah dilakukan evaluasi terhadap seluruh metode/strategi implementasi kebijakan dalam mencapai tujuan kebijakan	Laporan evaluasi kesesuaian metode implementasi dan tindak lanjutnya	Melihat secara objektif program-program kebijakan yang ditujukan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan sejauh mana tujuan-tujuan yang ada telah dinyatakan telah tercapai.
		Telah dilakukan evaluasi terhadap sebagian besar metode/strategi implementasi kebijakan dalam mencapai tujuan kebijakan		
		Telah dilakukan evaluasi terhadap sebagian kecil metode/strategi implementasi kebijakan dalam mencapai tujuan kebijakan		
		Tidak dilakukan evaluasi terhadap kesesuaian metode/strategi implementasi kebijakan dengan tujuan kebijakan		

TABEL INSTRUMEN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN

Tahapan/Pernyataan Kunci		Jawaban		Bukti	Keterangan
D.2 Efisiensi (15%)					
	a	Dilakukan evaluasi atas efisiensi kebijakan	Evaluasi atas efisiensi kebijakan terukur disertai dengan kejelasan tindak lanjut yang diperlukan untuk perbaikan	Laporan evaluasi penggunaan sumber daya kebijakan (yang telah diidentifikasi pada tahap implementasi) dalam pencapaian output.	Dibandingkan antara pembiayaan dan output dari kegiatan penyusunan kebijakan. Realisasi anggaran dan output (Anggaran >=80% - 100%).
			Evaluasi atas efisiensi kebijakan terukur namun tidak disertai kejelasan tindaklanjut yang diperlukan untuk perbaikan		
			Evaluasi atas efisiensi kebijakan tidak terukur		
			Belum dilakukan evaluasi atas efisiensi kebijakan		
	b	Dilakukan upaya-upaya efisiensi sumberdaya dalam pencapaian tujuan kebijakan	Dilakukan upaya efisiensi terhadap seluruh aspek sumber daya dalam pencapaian tujuan	Laporan evaluasi penggunaan sumber daya kebijakan (yang telah diidentifikasi pada tahap implementasi) dalam pencapaian output.	
			Dilakukan upaya efisiensi terhadap beberapa aspek sumber daya dalam pencapaian tujuan		
			Dilakukan upaya efisiensi terhadap salah satu aspek sumber daya dalam pencapaian tujuan		
			Tidak dilakukan upaya efisiensi sumberdaya dalam pencapaian tujuan kebijakan		

TABEL INSTRUMEN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN

Tahapan/Pernyataan Kunci		Jawaban	Bukti	Keterangan
D.3 Evaluasi atas Penerimaan, Responsivitas, Dampak dan Kemanfaatan Kebijakan (45%)				
	a	Kelompok sasaran menerima atas keberadaan kebijakan	Seluruh atau sebagian besar kelompok sasaran, termasuk kelompok rentan, memiliki persepsi positif atas keberadaan kebijakan	Kebijakan yang dibuat diharapkan juga dapat diterima oleh kelompok sasaran.
			Sebagian besar kelompok sasaran memiliki persepsi positif atas keberadaan kebijakan	
			Hanya sebagian kecil kelompok sasaran yang memiliki persepsi positif atas keberadaan kebijakan	
			Belum dilakukan evaluasi terhadap penerimaan kelompok sasaran atas keberadaan kebijakan	
	b	Responsivitas kebijakan selaras dengan kebutuhan kelompok sasaran	Sebagian besar anggota kelompok sasaran menilai kebijakan telah selaras dengan kebutuhan mereka dan telah mendorong lahirnya nilai-nilai positif baru	Kebijakan yang dibuat diharapkan juga mengakomodir kebutuhan kelompok sasaran.
			Sebagian besar anggota kelompok sasaran menilai kebijakan telah selaras dengan kebutuhan mereka namun tidak mendorong lahirnya nilai-nilai positif baru	
			Sebagian kecil anggota kelompok sasaran menilai kebijakan telah selaras dengan kebutuhan mereka	
			Belum dilakukan evaluasi terhadap responsivitas kebijakan atas kebutuhan kelompok sasaran	
	c	Hasil kebijakan memenuhi preferensi kelompok sasaran	Hasil kebijakan telah memenuhi preferensi kelompok sasaran dimana seluruh kelompok sasaran mengalami peningkatan utilitas/welfare	Kebijakan yang dibuat diharapkan juga dapat memenuhi preferensi kelompok sasaran.
			Hasil kebijakan telah memenuhi preferensi kelompok sasaran dimana sebagian besar kelompok sasaran mengalami peningkatan utilitas/welfare	
			Hasil kebijakan telah memenuhi preferensi kelompok sasaran dimana sebagian kecil kelompok sasaran mengalami peningkatan utilitas/welfare kelompok sasaran	
			Belum dilakukan evaluasi atas pengaruh hasil kebijakan terhadap peningkatan utilitas/welfare kelompok sasaran	

TABEL INSTRUMEN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN

Tahapan/Pernyataan Kunci		Jawaban	Bukti	Keterangan
d	Hasil kebijakan memberikan dampak terhadap kelompok rentan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan	Hasil kebijakan telah memberikan dampak terhadap seluruh kelompok rentan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan	Tindak lanjut atau hasil dari penjelasan dampak dan manfaat kebijakan yang telah dilakukan di tahapan implementasi	Tujuan kebijakan yang dibuat diharapkan juga dapat memberikan dampak kepada kelompok rentan
		Hasil kebijakan memberikan dampak terhadap sebagian kelompok rentan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan		
		Hasil kebijakan belum memberikan dampak terhadap kelompok rentan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan		
e	Kebijakan meningkatkan kualitas penggunaan sumberdaya dan proses kerja penyelesaian masalah menjadi lebih efisien dibandingkan dengan kebijakan yang ada sebelumnya	Belum dilakukan evaluasi atas pengaruh hasil kebijakan terhadap kelompok rentan	Laporan evaluasi penggunaan sumber daya kebijakan dibandingkan dengan proses kerja penyelesaian masalah	Sumber daya merupakan bahan - bahan yang digunakan dalam membuat ataupun menjalankan kebijakan. Bahan - bahan tersebut seperti: anggaran, SDM, peralatan penunjang kebijakan, waktu, dll.
		Kebijakan telah meningkatkan seluruh kualitas penggunaan sumber daya dan proses kerja penyelesaian masalah menjadi lebih efisien		
		Kebijakan telah meningkatkan sebagian besar kualitas penggunaan sumber daya dan proses kerja penyelesaian masalah menjadi lebih efisien		
D.4	Informasi tambahan terkait evaluasi kebijakan	Kebijakan telah meningkatkan sebagian kecil kualitas penggunaan sumber daya dan proses kerja penyelesaian masalah menjadi lebih efisien		
		Belum dilakukan evaluasi atas pengaruh kebijakan terhadap peningkatan kualitas penggunaan sumberdaya dan proses kerja		
		Silahkan untuk menambahkan informasi penting terkait evaluasi kebijakan dilihat dari aspek : 1. efektivitas, 2. efisiensi, 3. penerimaan, dampak, dan kemanfaatan		

